

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia

a. Sejarah Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Pusdiklat Kesejahteraan Sosial sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Departemen Sosial eksistensinya sebenarnya sudah ada sejak tahun 1975 yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat, kemudian tahun 1984 dikukuhkan dengan nama Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Pegawai yang didukung dengan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 12/HUK/1984 tentang Kebijakan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai di lingkungan Departemen Sosial. Sedangkan Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Tenaga Sosial mulai dikukuhkan pada tahun 1984 yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 200 Jakarta Timur.

Pada awal kegiatannya Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Pegawai melaksanakan program-program ujian kedinasan dan diklat penjenjangan guna memenuhi formasi kepegawaian di lingkungan Departemen Sosial. Sedangkan Pusdiklat

Kesejahteraan Sosial Tenaga Sosial berfungsi melaksanakan program-program kediklatan bagi satuan tugas sosial yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia.

Perkembangan selanjutnya Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Pegawai tidak hanya melaksanakan program diklat penjenjangan dan ujian dinas saja tetapi lebih mengarah pada kediklatan teknis, fungsional dan profesi, begitu juga dengan Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Tenaga Sosial yang melaksanakan diklat-diklat Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) dimana pelaksanaannya tidak hanya di pusat namun dilaksanakan juga di sejumlah Balai di daerah.

Pada tahun 1995, Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Pegawai digabung dengan Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Tenaga Sosial dengan nomenklatur Pusdiklat kesejahteraan sosial Pegawai dan Tenaga Sosial (Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Pegnasos) dengan program dan kegiatan yang sama dan berlangsung hingga tahun 1999. Ketika Departemen Sosial dibubarkan pada tahun 2001, maka berubah nomenklatur menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) dan merjer dengan Departemen Kesehatan menjadi Depkes Kesos, Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Pegnasos berubah nama menjadi Pusdiklat Kesejahteraan Sosial.

Saat Departemen Sosial dihidupkan kembali Pusdiklat Kesejahteraan Sosial kembali dipecah kembali dengan nama Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Pegawai dan Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM).

Kemudian saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan desakan restrukturisasi atau pembenahan di lingkungan Departemen Sosial maka muncul Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 82 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI, dimana Pusdiklat Kesejahteraan Sosial kembali mengalami penggabungan dengan nomenklatur Pusdiklat Kesejahteraan Sosial dan berlangsung hingga sekarang.

Lembaga ini dipimpin langsung oleh Kepala Pusdiklat Kesejahteraan Sosial dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pendidikan dan Penelitian Penyuluhan Sosial. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pusdiklat Kesejahteraan Sosial berkoordinasi langsung melalui Sekretariat Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial berada di Jl. Margaguna Raya No.1 Radio Dalam, Jakarta Selatan.

b. Visi, Misi dan Tujuan Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Sesuai dengan nama organisasinya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rumusan kebijakan program pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial.
- 2) Penyusunan rencana dan program serta anggaran pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial
- 3) Pengorganisasian program pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial
- 4) Pelaksanaan, pengembangan serta penjaminan mutu program pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial
- 5) Pengendalian program pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial
- 6) Penyelenggaraan ketatausahaan pusat pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial.

Pusdiklat Kesejahteraan Sosial memiliki visi, misi dan tujuan sebagai berikut:

1) Visi Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Menjadi pusat pengembangan SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkualitas di Indonesia.

2) Misi Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

- a) Mewujudkan manajemen ketatausahaan diklat yang profesional dan menciptakan lingkungan kediklatan yang kondusif sebagai model penatakelolaan proses pembelajaran orang dewasa.

- b) Melaksanakan dan mengembangkan berbagai jenis diklat yang berorientasi pada kebutuhan peningkatan kompetensi SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik aparatur pemertintah maupun kesejahteraan masyarakat.
- c) Meningkatkan penjaminan mutu diklat kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tuntutan perkembangan zaman.
- d) Mengembangkan jaringan kerjasama diklat kesejahteraan sosial dalam maupun luar negeri dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir secara efektif dan efisien.

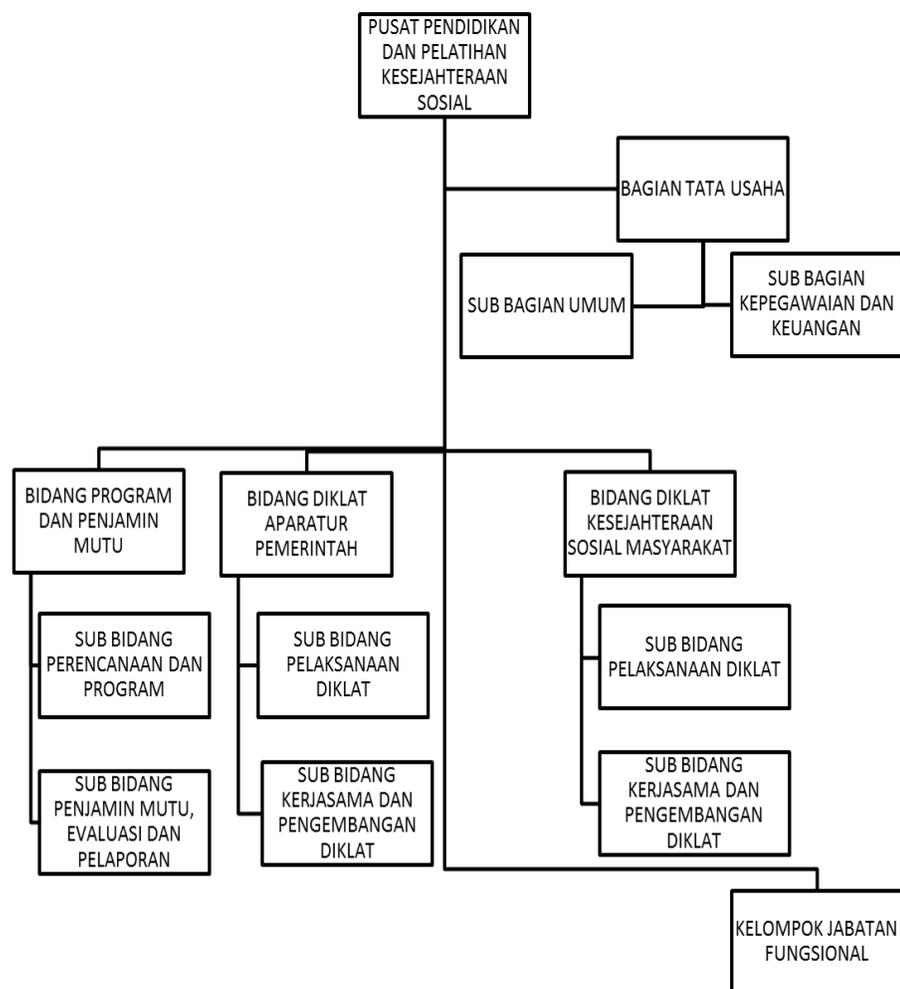
3) Tujuan Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

- a) Terwujudnya manajemen ketatausahaan diklat yang profesional dan menciptakan lingkungan kediklatan yang kondusif sebagai model penatakelolaan proses pembelajaran orang dewasa.
- b) Tercapainya pelaksanaan dan pengembangan berbagai jenis diklat yang berorientasi pada kebutuhan peningkatan kompetensi SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik aparatur pemertintah maupun kesejahteraan masyarakat.
- c) Terwujudnya peningkatan penjaminan mutu diklat kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tuntutan perkembangan zaman.
- d) Tercapainya jaringan kerjasama diklat kesejahteraan sosial dalam maupun luar negeri dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir secara efektif dan efisien.

c. Struktur Organisasi

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala Pusdiklat Kesejahteraan Sosial langsung membawahi bagian tata usaha dan bidang lainnya yaitu Bidang

Program dan Penjaminan Mutu, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut gambar struktur organisasi di Pusdiklat kesejahteraan sosial Kesejahteraan Sosial:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

2. Gambaran Umum Diklat TOT P2K2 PKH

a. Profil Diklat TOT P2K2 PKH

Training Of Trainer (TOT) adalah salah satu program pelatihan berbasis *soft skill* yang wajib diikuti bagi siapa saja yang dalam aktifitas kegiatannya menjadi seorang trainer/instruktur/pengajar ataupun seorang pemimpin yang bertugas mengkoordinir/mendelegasikan ilmu dan pengetahuan kepada bawahan atau atasannya sebagai bentuk edukasi ataupun transfer *knowledge* di lingkungan organisasi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Adanya program ini salah satunya adalah untuk meningkatkan kemampuan seorang trainer/fasilitator yang handal sehingga memberikan pengaruh terhadap sikap dan perilaku sebagai trainer/fasilitator/pengajar yang profesional, harapannya yaitu mampu melihat, analisa kebutuhan pelatihan, model pengajaran yang tepat serta berbagai tool yang dibutuhkan dalam berbagai situasi kelas dan audience yang dihadapi.

P2K2 adalah proses belajar peserta PKH berupa pemberian dan pembahasan informasi praktis di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan keluarga yang disampaikan melalui pertemuan kelompok bulanan.

Diklat TOT P2K PKH merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas Pendamping PKH diperlukan

instruktur/pelatih yang memadai untuk melatih Pendamping PKH agar mampu mempercepat pencapaian tujuan PKH. Selain itu diklat ini juga ditujukan agar peserta diklat memiliki kapasitas dalam memantau pelaksanaan P2K2 di wilayah kerjanya. Untuk memfasilitasi hal tersebut Kementerian Sosial RI mengadakan TOT P2K2 PKH dengan target peserta para Koordinator Wilayah, Koordinator Kabupaten/kota dan Staf Direktorat Jaminan Sosial Keluarga yang ditunjuk. Diklat TOT P2K2 PKH merupakan proses pembelajaran dengan kemasan kurikulum yang lebih mengedepankan praktek (80%) dibandingkan teori (20%), TOT P2K2 PKH dianggap perlu agar semua pelaksanaan penyelenggaraan TOT P2K2 PKH dapat terkoordinasi dengan baik dan mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

b. Tujuan Diklat TOT P2K2 PKH

Diharapkan dengan adanya penyelenggaraan TOT P2K2 PKH yang dilaksanakan Pusdiklat Kesejahteraan Sosial agar sesuai ketentuan dan terwujudnya kualitas lulusan peserta TOT sesuai dengan kriteria. Setelah selesai mengikuti TOT P2K2 PKH, peserta diharapkan dapat:

- 1) Memahami Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Perlindungan Sosial dalam kaitan dengan tujuan P2K2 PKH.
- 2) Menjelaskan manfaat P2K2 bagi peningkatan kemampuan KSM dalam memutus kemiskinan.
- 3) Menjelaskan dan mempraktekkan teknik-teknik fasilitasi dalam proses pembelajaran.
- 4) Memiliki motivasi yang tinggi dalam memfasilitasi Pendamping PKH.
- 5) Menjelaskan dan mempraktekkan manfaat kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan anak serta disabilitas dan lanjut usia.

c. Sasaran Peserta Diklat TOT P2K2 PKH

- 1) Jumlah peserta:
 - a) Jumlah peserta untuk setiap angkatan adalah sebanyak 30 orang.
 - b) Mempertimbangkan komposisi laki-laki dan perempuan.
- 2) Persyaratan Kompetensi Peserta:
 - a) Pendidikan minimal S1.
 - b) Sudah pernah mengikuti pembekalan materi PKH dan diutamakan calon peserta yang sudah mengikuti TOT dan Diklat Pendamping PKH.
 - c) Bersedia menjadi fasilitator pada diklat berikutnya bila mana dibutuhkan.
- 3) Asal Peserta:
 - a) Widyaiswara di lingkungan Kementerian Sosial RI baik di Pusat maupun di daerah.

- b) Tenaga potensial di lingkungan Kementerian Sosial dan instansi terkait.
 - c) Unsur mitra kerja yang terkait dengan PKH (UPPKH Pusat, Perguruan Tinggi, Organisasi Sosial, dll).
- d. Narasumber/Fasilitator Peserta Diklat TOT P2K2 PKH
- Narasumber/Fasilitator diberi kewenangan untuk menyampaikan materi pada TOT P2K2 PKH, meliputi:
- 1)Narasumber, yang terdiri dari:
 - a) Pejabat Struktural Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Kementerian Sosial RI
 - b) Pejabat Struktural dari Instansi terkait yang membidangi penanganan PKH
 - c) Tenaga Ahli/Konsultan yang membidangi Penanganan PKH
 - 2)Fasilitator, terdiri dari:
 - a) Penyusun Modul TOT/Diklat P2K2 PKH
 - b) Widyaiswara Pusdiklat Kesejahteraan Sosial dan sudah pernah mengikuti MOT P2K2 PKH.
 - c) Widyaiswara Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan sudah pernah mengikuti MOT P2K2 PKH.

d) Pihak terkait (Ahli, Praktisi) yang sudah pernah mengikuti MOT P2K2 PKH.

e. Sarana dan Prasarana Pendukung Diklat

Pusdiklat Kesejahteraan Sosial dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif bagi peserta diklat. Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pusdiklat Kesejahteraan Sosial yaitu gedung perkantoran, ruang pimpinan, ruang perpustakaan, ruang kelas, ruang makan, aula, gedung asrama, ruang olahraga, ruang microteaching, laboratorium komputer, masjid, gazebo, lapangan, sarana outbond, halaman parkir, posko security. Secara rinci sarana dan prasarana Pusdiklat Kesejahteraan Sosial dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

3. Perencanaan Kurikulum Diklat TOT P2K2 PKH

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mulai dari pengamatan, wawancara dan studi dokumen, perencanaan kurikulum diklat di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial berfungsi sebagai pedoman yang berisi petunjuk dalam proses pembelajaran pada kegiatan diklat. Proses perencanaan kurikulum diklat diawali dari tahap identifikasi kebutuhan yang merupakan proses memperoleh data dan

informasi yang dijadikan dasar atau pedoman bagi penentuan tujuan penyelenggaraan program-program pelatihan. Sebelum menyusun atau membuat sebuah program perlu melakukan identifikasi kebutuhan terlebih dahulu. Diklat TOT P2K2 PKH berawal dari program pemerintah sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan. Program keluarga harapan ini sudah ada sejak tahun 2007 yang merupakan program nasional dari masalah kemiskinan yang semua negara mengalaminya juga. Program keluarga harapan lebih cenderung dengan pemberian bantuan tunai saja. Ternyata dalam upaya mengurangi angka kemiskinan itu perlu adanya motivasi untuk mengubah perilaku. Kemiskinan dipengaruhi beberapa faktor yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan sosial juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu perlindungan anak, disabilitas dan lanjut usia. Berdasarkan hal tersebut, Identifikasi kebutuhan P2K2 PKH dilakukan dengan memperhatikan ketentuan/kebijakan pemerintah, pandangan para ahli, pengalaman negara lain, hasil riset mengenai kemiskinan dan disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang terjadi di Indonesia mengenai masalah kemiskinan. Identifikasi kebutuhan menghasilkan data dan informasi yang dijadikan dasar bagi penentuan tujuan

penyelenggaraan program-program diklat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Tahap selanjutnya yaitu Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, menggambarkan sifat sebenarnya, menentukan sebab-sebab, rekomendasi berupa solusi alternatif yang tepat dengan permasalahan kemiskinan yang terjadi dilapangan. Analisis Kebutuhan Diklat diawali dengan membuat instrumen analisis kebutuhan diklat didukung dengan referensi buku. Instrumen analisis kebutuhan diklat digunakan sebagai petunjuk melakukan analisis kebutuhan diklat/petunjuk pelaksanaan analisis kebutuhan diklat. Selanjutnya dilaksanakan dengan cara turun lapangan yaitu mengunjungi beberapa daerah bagian barat dan timur indonesia. Analisis kebutuhan diklat berbentuk: (1) wawancara kemasyarakat untuk mengetahui informasi langsung tentang apa yang dialami dan masalah yang dialami oleh masyarakat, (2) penyebaran kuisisioner bertujuan untuk mendapatkan informasi agar responden bisa memberi jawaban dengan mengisi daftar pertanyaan yang ada dikuisisioner, (3) FGD (*Focus Group Discussion*) melakukan diskusi tidak kaku terkait masalah-masalah kemiskinan yang dialami masyarakat, (4) DIF (*Difficulty Importance Frequency*) yaitu menganalisis melalui diskusi mendalam untuk mengetahui tingkat

kesulitan, kepentingan dan keseringan yang terjadi di lapangan. Hasil analisis kebutuhan diklat yaitu mendapatkan data dan informasi yang sesuai agar penyelenggaraan program diklat mampu menjawab persoalan-persoalan organisasi karena sudah direncanakan dengan matang sebelumnya.

Tahap selanjutnya yaitu Penyusunan Kurikulum berfungsi sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Penyusunan kurikulum berbentuk pertemuan diskusi/rapat dengan melakukan *brainstorming* dalam menyusun kurikulum memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yaitu pertimbangan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan hasil analisis kebutuhan diklat yang sesuai dengan kondisi dilapangan. Pertimbangan tersebut digunakan untuk menentukan latar belakang kurikulum, tujuan kurikulum, kompetensi dasar, mata diklat dan jam diklat, kriteria peserta diklat dan tenaga pengajar dan evaluasi. Dalam menentukan alokasi waktu berasal dari pertimbangan jumlah waktu efektif dan alokasi waktu mata pelatihan per minggu/waktu yang disediakan, pertimbangan jumlah kompetensi dasar, keluasan dan kedalam tingkat kepentingan kompetensi dasar.

Tahap selanjutnya yaitu Penyusunan Modul merupakan sebuah produk yang dihasilkan dari kurikulum. Modul sebagai bahan

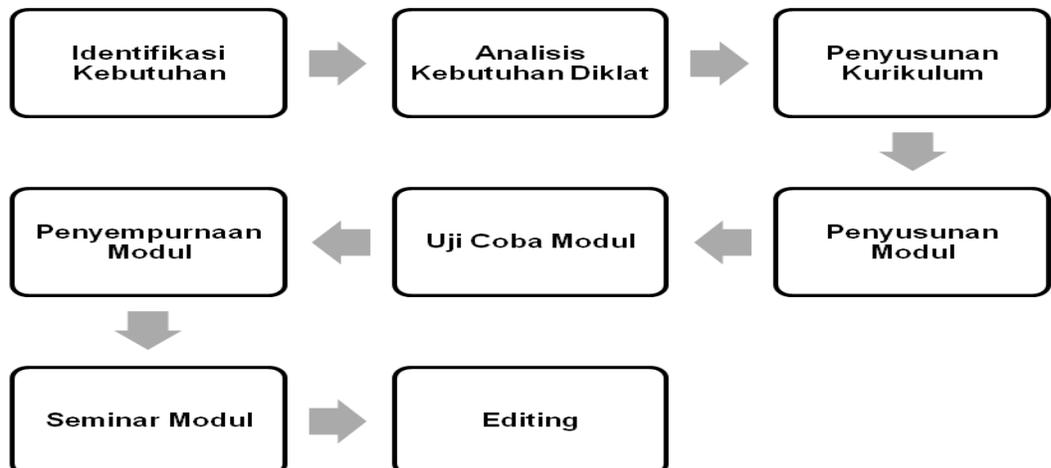
ajar yang membantu peserta diklat dan narasumber/fasilitator dalam proses pembelajaran. Penyusunan modul berbentuk pertemuan diskusi/rapat dengan melakukan *brainstorming* untuk menentukan kompetensi inti, materi diklat, metode dan media pembelajaran yang dibuat sangat sederhana serta disesuaikan dengan keadaan lapangan yang didukung dengan pendapat pakar ahli, referensi buku-buku dan peraturan pemerintah.

Tahap selanjutnya yaitu Uji Coba Modul dengan cara mensosialisasikan dan menguji implementasi sementara hasil penyusunan modul berupa materi yang tersedia di modul, metode dan media yang digunakan kepada masyarakat dilapangan. Proses uji coba diawali dengan membuat instrumen uji coba modul didukung dengan referensi buku. Instrumen uji coba modul digunakan sebagai petunjuk melakukan uji coba modul/petunjuk pelaksanaan uji coba modul. Uji coba modul dilakukan beberapa kali yaitu turun kelapangan dengan mengunjungi beberapa daerah bagian barat dan timur Indonesia. Uji coba modul dengan memaparkan materi, media dan metode yang ada didalam modul kepada peserta PKH/masyarakat. Uji coba modul ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Hasil uji coba modul didapatkan pertimbangan dan saran terkait isi modul dari peserta PKH/masyarakat.

Tahap selanjutnya yaitu Penyempurnaan Modul merupakan kegiatan menganalisis kelemahan dan kelebihan hasil uji coba modul. Penyempurnaan modul menghasilkan modul yang akan digunakan dalam kegiatan diklat.

Tahap selanjutnya yaitu Seminar Modul merupakan sebuah kegiatan memaparkan hasil modul yang telah disempurnakan. Pada tahap seminar modul dilakukan kajian bersama konsultan, pakar atau ahli yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dan saran terkait isi modul dalam tahap akhir penyempurnaan kurikulum.

Tahap terakhir yaitu Editing merupakan kegiatan memilih dan menyusun ulang modul hingga modul tersebut siap digunakan dalam kegiatan diklat. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disajikan dalam bentuk skema sebagaimana berikut:



Gambar 4.2 Proses Perencanaan Kurikulum Diklat

(Data lapangan, diolah peneliti, 2017)

Program Keluarga Harapan sudah ada sejak tahun 2007, untuk perencanaan kurikulum program P2K2 PKH pastinya jauh sebelum program P2K2 PKH dibuat kurang lebih pada tahun 2012. Karena diklat TOT P2K2 PKH sebelumnya diselenggarakan UNICEF dan World Bank di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial ada pada tahun 2013.

Yang berperan dalam proses perencanaan kurikulum diklat TOT P2K2 PKH yaitu Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai penanggung jawab program P2K2 PKH. Perencanaan kurikulum mulai dari tahap indentifikasi kebutuhan, analisis kebutuhan diklat, penyusunan kurikulum, penyusunan modul, uji coba modul, penyempurnaan modul, seminar modul dan editing yang memiliki peranan yaitu dalam bidang pendidikan dan ekonomi yaitu world bank, bidang kesehatan yaitu UNICEF bersama kementerian kesehatan, bidang perlindungan anak yaitu Pusdiklat Kesejahteraan Sosial didukung oleh UNICEF, bidang disabilitas dan lanjut usia yaitu pusdiklat kesejahteraan sosial. Pihak-pihak dari pusdiklat kesejahteraan sosial yaitu kepala subbidang kerjasama dan pengembangan diklat kesejahteraan sosial masyarakat beserta widyaiswara sebagai pelaksana pengembangan/penyempurnaan kurikulum, modul dan pedoman diklat kesejahteraan sosial masyarakat. Kaitannya dengan program kemiskinan, maka

kerjasama yang dilakukan melibatkan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dan Australia Aid. Dalam perencanaan kurikulum turut mengundang direktorat-direktorat yang terkait dengan bidang tersebut seperti Direktorat penyandang disabilitas, Direktorat lanjut usia, Direktorat anak, narasumber (konsultan dan praktisis), ilustrator yang bertujuan untuk memberikan masukan-masukan yang sesuai mengenai isi materi dalam modul yang sesuai yang akan digunakan dalam kegiatan diklat TOT P2K2 PKH.

Kurikulum sudah selesai disusun setelah itu menentukan kegiatan diklat diawali dengan menyusun jadwal kegiatan diklat. Proses menyusun jadwal kegiatan diklat berbentuk rapat persiapan diklat bertujuan agar tidak ada jadwal bersamaan dengan balai-balai 6 regional lain yaitu balai besar Jawa Barat, balai besar DIY Yogyakarta, balai besar Sumatera Barat, balai besar Kalimantan Selatan, balai besar Sulawesi Selatan dan balai besar Papua. Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyeluhun Sosial menyelenggarakan rapat koordinasi diklat yang tujuannya menyusun agenda kediklatan selama 1 tahun baik dipusat sampai daerah yang berbentuk kalender kediklatan. Karena sasaran peserta diklat di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial adalah widyaiswara-widyaiswara dari 6 balai besar, koodinator

wilayah dan koodinator kabupaten/kota jadi apabila peserta diklat tersebut sedang ada kegiatan diklat ditempatnya pusdiklat kesejahteraan sosial tidak bisa mengundang mereka sebagai peserta diklat. Yang terlibat dalam penyusunan jadwal kegiatan diklat adalah Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, perwakilan dari pusdiklat kesejahteraan sosial yaitu bidang Program Penjaminan Mutu (PPM) dan bidang Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) dan perwakilan dari 6 balai besar diklat.

4. Pelaksanaan Kurikulum Diklat TOT P2K2 PKH

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mulai dari pengamatan, wawancara dan studi dokumen, pelaksanaan kurikulum diklat merupakan realisasi atas perencanaan kurikulum diklat yang sebelumnya telah disusun. Dalam pelaksanaan kurikulum, Pusdiklat Kesejahteraan Sosial telah memiliki dokumen yang mendukung kegiatan pelaksanaan kurikulum diklat yaitu: (1) Surat Keputusan (SK) Kepala Pusdiklat kesejahteraan sosial tentang Penyelenggaraan Diklat TOT P2K2 PKH yang memuat pihak-pihak atau sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan diklat, (2) Pedoman pelaksanaan diklat TOT P2K2 PKH yang memuat latar belakang, dasar hukum, maksud tujuan, peserta, kurikulum, prinsip, tata urutan pelatihan, metode pembelajaran, media pembelajaran, panitia,

narasumber/fasilitator, supervisi, penyelenggaraan, evaluasi dan laporan, (3) Skenario Praktek Belajar Lapangan (PBL) diklat TOT P2K2 PKH memuat prosedur pelaksanaan dalam melakukan PBL, (4) Jadwal diklat TOT P2K2 PKH memuat jadwal pelaksanaan diklat, dan (5) Tata tertib pelaksanaan diklat TOT P2K2 PKH memuat peraturan tata tertib yang harus dipatuhi oleh peserta diklat.

Dalam pelaksanaan kurikulum diklat TOT P2K2 PKH yaitu kepala bidang tenaga kesejahteraan sosial masyarakat berperan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan diklat TOT P2K2 PKH, kepala sub bidang pelaksanaan diklat kesejahteraan sosial masyarakat berperan sebagai pelaksana kegiatan diklat TOT P2K2 PKH, staf bidang pelaksanaan diklat kesejahteraan sosial masyarakat berperan membantu memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan diklat TOT P2K2 PKH dan narasumber/fasilitator berperan sebagai tenaga pengajar diklat TOT P2K2 PKH.

Kegiatan pelaksanaan kurikulum diklat TOT P2K2 PKH direalisasikan melalui kegiatan diklat dalam bentuk proses pembelajaran di dalam kelas dan praktek belajar lapangan di daerah. Pelaksanaan kurikulum diklat TOT P2K2 PKH melalui proses pembelajaran di kelas karena merupakan tempat untuk melaksanakan kurikulum. Proses pembelajaran TOT P2K2 PKH terbagi menjadi dua bagian yang tidak dapat dipisahkan yaitu

pembelajaran di kelas (*indoor*) dan diluar (*outdoor*) berupa Praktek Belajar Lapangan (PBL). PBL merupakan praktek belajar lapangan yang merupakan program lanjutan dari proses *indoor* yang dilakukan di daerah yang bertujuan untuk pengaplikasian materi yang dipelajari di kelas (*indoor*).

Proses pembelajaran diklat TOT P2K2 PKH di dalam kelas diawali dengan memastikan kesiapan komponen-komponen yang mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan diklat TOT P2K2 PKH. Komponen pertama berkaitan dengan narasumber/fasilitator yaitu widyaiswara, konsultan P2K2 PKH, pakar bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, anak dan kesejahteraan sosial. Untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kurikulum dengan perencanaan kurikulum diklat, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi widyaiswara untuk dapat dijadikan sebagai narasumber/fasilitator. Adapun syarat yang harus dipenuhi antara lain: widyaiswara yang sudah mengikuti TOT P2K2 PKH, mengikuti *coaching* TOT P2K2 PKH, penyusun modul P2K2 PKH dan widyaiswara yang menguasai materi diklat TOT P2K2 PKH.

Komponen kedua yaitu berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pusdiklat Kesejahteraan Sosial. Di dalam proses pembelajaran diklat TOT P2K2 PKH Pusdiklat Kesejahteraan Sosial telah memiliki prasarana yang menunjang

kegiatan diklat yaitu gedung perkantoran, ruang pimpinan, ruang perpustakaan, ruang kelas, ruang makan, aula, gedung asrama, ruang olahraga, ruang microteaching, laboratorium komputer, masjid, gazebo, lapangan, sarana outbond, halaman parkir, posko *security*. Selain itu, Pusdiklat Kesejahteraan Sosial ini juga telah memiliki sarana yang menunjang dalam pelaksanaan kurikulum diklat yaitu meja, kursi, *whiteboard*, *flip over chart*, papan tancap dengan kertas/kartu metaplan, paku tancap, lem/perekat, silotip, *flannel board* beserta *flannel graphnya*, LCD yang dihubungkan dengan laptop, komputer/laptop, TV, *sound system* dan sarana lain sesuai kebutuhan pelaksanaan diklat.

Komponen ketiga yaitu berkaitan dengan media dan bahan ajar yang dimiliki oleh pusdiklat kesejahteraan sosial kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan diklat TOT P2K2 PKH Pusdiklat Kesejahteraan Sosial telah menggunakan media dan bahan ajar/praktek yang sesuai dengan perencanaan kurikulum diklat yaitu modul P2K2 PKH, lembar penyajian materi, lembar tugas, lembar/kartu arus tulisan atau gambar, lembar bacaan, lembar petunjuk simulasi, lembar petunjuk peragaan, poster, leaflet, booklet, bagan-bagan, formulir-formulir, lembar cerita/lembar kasus, lembar petunjuk permainan, media penyajian power point dalam USB/CD,

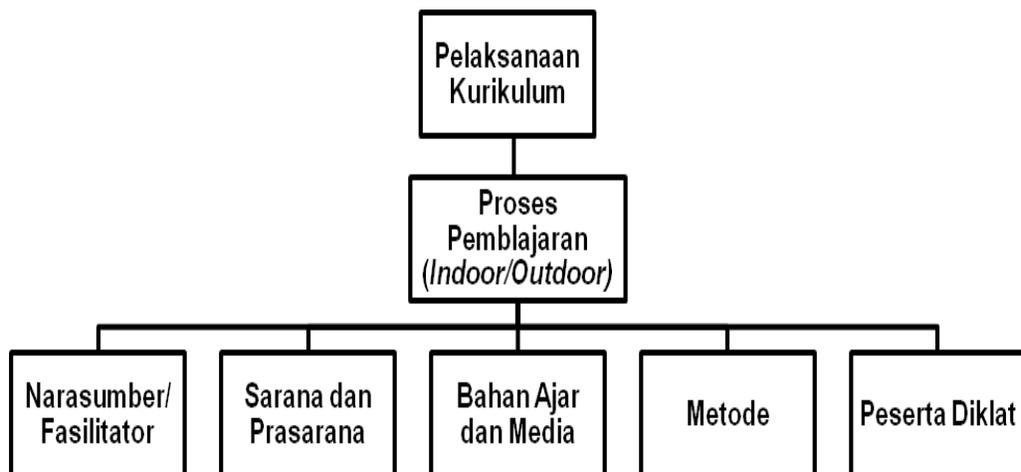
pegangan peserta dalam bentuk buku/CD, lembar bahan ajar, alat bantu peraga dan media bahan sesuai kebutuhan.

Komponen keempat yaitu berkaitan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran diklat TOT P2K2 PKH di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial menggunakan metode pembelajaran seperti ceramah, peragaan, tanya jawab, simulasi, bermain peran, curah pendapat, diskusi kelompok, diskusi pleno, diskusi panel, sumbang saran, penugasan, berbagi pengalaman, studi kasus, forum group discussion dan praktek sesuai perencanaan kurikulum yaitu metode yang dibutuhkan dalam diklat TOT P2K2 PKH.

Komponen kelima yaitu berkaitan dengan peserta diklat. Untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kurikulum diklat dengan perencanaan kurikulum diklat, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi peserta didik. Adapun syarat yang harus dipenuhi antara lain: pendidikan minimal S1, sudah pernah mengikuti pembekalan materi PKH dan diutamakan calon peserta yang sudah mengikuti TOT dan Diklat Pendamping PKH, bersedia menjadi fasilitator pada diklat berikutnya bila mana dibutuhkan. Peserta diklat TOT P2K2 PKH berasal dari widyaiswara di lingkungan Kementerian Sosial RI baik di Pusat maupun di daerah, tenaga potensial di lingkungan Kementerian Sosial dan instansi terkait, unsur mitra kerja yang terkait

dengan PKH (UPPKH Pusat, Perguruan Tinggi, Organisasi Sosial, dll).

Adapun fasilitas yang didapatkan oleh peserta yang mengikuti diklat TOT P2K2 PKH yaitu modul, nametag, tas, kaos dan ATK, akomodasi dan konsumsi selama diklat, penggantian biaya transportasi dengan pesawat kelas ekonomi kecuali peserta dari jakarta dan jawa barat menggunakan transportasi darat. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disajikan dalam bentuk skema sebagaimana berikut:



**Gambar 4.3 Komponen Pelaksanaan Kurikulum Diklat
(Data lapangan, diolah peneliti, 2017)**

Dalam proses pembelajaran diklat TOT P2K2 PKH dikelas, widyaiswara membuka pelajaran dengan interaktif kepada peserta diklat, materi yang disampaikan mengikuti setiap langkah yang ada di modul sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, menutup pelajaran dengan menyisipkan motivasi dan mengulang materi yang sudah dipelajari, memanfaatkan sarana dan prasarana, menggunakan bahan ajar dan memanfaatkan media pembelajaran diklat.

Diklat TOT P2K2 PKH diselenggarakan dengan waktu 80 jam pelatihan, dengan alokasi waktu penyelenggaraan selama 17 hari efektif. Pelaksanaan diklat lebih banyak dilakukan dengan praktek dan simulasi yakni sebanyak 80%, sedangkan penyampaian materi berupa paparan dilakukan sebanyak 20% dari keseluruhan waktu pelaksanaan diklat TOT P2K2 PKH, termasuk didalamnya 2 jam pelatihan pretest dan posttest serta 2 jam pelatihan untuk upacara pembukaan dan penutupan. Disamping itu juga terdapat penjelasan teknis pelaksanaan diklat 2 jam pelatihan dan pengarahan dari pimpinan satuan kerja 2 jam pelatihan.

Penilaian yang digunakan dalam pelaksanaan diklat TOT P2K2 PKH yaitu pretest dan posttest, instrumen penilaian peserta, evaluasi terhadap widyaiswara/fasilitator dan *Manager Of Trainer* (MOT), evaluasi penyelenggaraan diklat berupa penyebaran dan pemanfaatan angket/kuisisioner yang diberikan kepada peserta diklat

untuk menilai dan mengevaluasi penyelenggara diklat yang diberikan kepada peserta diklat sebagai bahan acuan untuk penyempurnaan atau pelaksanaan diklat TOT P2K2 PKH di masa-masa yang akan datang. Instrumen evaluasi penyelenggara diklat terdiri dari 6 bagian yang meliputi kurikulum, tenaga pengajar, peserta, penyelenggaraan/panitia, sarana dan prasarana, dan kondisi lingkungan diklat.

5. Evaluasi Kurikulum Diklat TOT P2K2 PKH

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mulai dari pengamatan, wawancara dan studi dokumen, evaluasi kurikulum diklat di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial yaitu menyajikan informasi yang berguna sebagai bahan pembuat keputusan apakah kurikulum tersebut diganti dengan kurikulum yang baru dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar yang berubah. Evaluasi kurikulum diklat yang dilakukan Pusdiklat Kesejahteraan Sosial yaitu evaluasi reaksi, proses pembelajaran, perilaku dan hasil. (1) Evaluasi reaksi merupakan respon atau tanggapan peserta terhadap proses pembelajaran dan penyelenggaraan diklat. Evaluasi dilakukan dalam bentuk instrumen evaluasi penyelenggaraan diklat, (2) Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk mengukur ada atau tidak

adanya perubahan pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitudes*) dan keterampilan (*skills*) peserta. Dalam diklat TOT P2K2 PKH evaluasi dilakukan dalam bentuk pretest dan posttest, (3) Evaluasi perilaku dilakukan untuk mengetahui perubahan tingkah laku peserta selama dan setelah proses pembelajaran. Evaluasi dilakukan dalam bentuk instrumen penilaian peserta diklat dan instrumen praktek diklat, (4) Evaluasi hasil terhadap penerapan hasil diklat dilakukan sekitar tiga bulan setelah diklat berakhir dengan maksud untuk mengukur kesesuaian (*applicability*) materi diklat yang telah diberikan. Melalui evaluasi ini dapat diketahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh dari diklat membawa manfaat untuk mengatasi masalah. Evaluasi semacam ini perlu dilakukan untuk keperluan perbaikan materi diklat. Evaluasi dilakukan dalam bentuk instrumen evaluasi alumni diklat.

Evaluasi kurikulum yang dilakukan Pusdiklat Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk penyempurnaan program yang dilakukan sebelumnya, sebagai proses pengawasan untuk menilai program kurikulum apakah sudah sesuai dengan tujuannya, untuk menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum.

Proses evaluasi kurikulum diawali dari tahap penyusunan instrumen evaluasi kurikulum diklat TOT P2K2 PKH kedalam bentuk

alat ukur penilaian terhadap penyelenggaraan diklat. Evaluasi kurikulum berbentuk pertemuan diskusi/rapat dengan melakukan brainstorming yang melibatkan kepala bidang program penjaminan mutu, kepala sub bidang penjaminan, pelaporan dan evaluasi, kepala bidang tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, kepala sub bidang kerja sama dan pengembangan diklat kesejahteraan sosial masyarakat, kepala sub bidang pelaksanaan diklat kesejahteraan sosial masyarakat beserta widyaiswara. Dalam menyusun instrumen evaluasi kurikulum berdasarkan referensi buku dan melihat instrument evaluasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang disesuaikan dengan kebutuhan evaluasi kurikulum diklat di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial. Instrumen evaluasi kurikulum diklat yaitu: (1) Instrumen evaluasi penyelenggara diklat bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi penyelenggara diklat yang diberikan kepada peserta diklat sebagai bahan acuan untuk penyempurnaan atau pelaksanaan diklat TOT P2K2 PKH di masa-masa yang akan datang, (2) Pretest dan posttest, instrumen penilaian peserta diklat serta instrumen praktek diklat yang didalamnya bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan sejauh mana peserta diklat dalam menerima materi dan mengaplikasikan materi tersebut, (3) Instrumen evaluasi widyaiswara yang bertujuan untuk mengetahui pengajar dalam penguasaan materi dalam pelaksanaan kurikulum diklat sesuai

dengan perencanaan kurikulum diklat, (4) Instrumen evaluasi *Master Of Trainer* (MOT) yang bertujuan bagaimana MOT dapat mengendalikan substansi pembelajaran dan proses pembelajaran, (5) Instrumen supervisi pelaksanaan diklat bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diklat dari segi tingkat penguasaan tenaga pengajar, ketersediaan sarana dan prasarana, tahapan pembelajaran, kinerja MOT, kehadiran dan keterlibatan peserta diklat, pemanfaatan alat bantu, (6) Instrumen evaluasi alumni diklat bertujuan untuk menyempurnakan dan mengembangkan penyelenggaraan diklat dan mengetahui kebutuhan SDM Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan pengembangan karier dan kinerja organisasi.

Tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data berupa informasi maupun penilaian melalui penyebaran angket/kuisisioner atau instrumen evaluasi lainnya. Kegiatan pelaksanaan evaluasi kurikulum diklat bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai implementasi suatu kurikulum yang kemudian dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam pengambilan keputusan, penyempurnaan dan pengembangan diklat TOT P2K2 PKH selanjutnya. Kegiatan pelaksanaan evaluasi kurikulum dilakukan pada pelaksanaan kegiatan diklat TOT P2K2 PKH dan sesudah proses diklat TOT P2K2 PKH. Penyebaran angket/kuisisioner untuk mendapatkan informasi

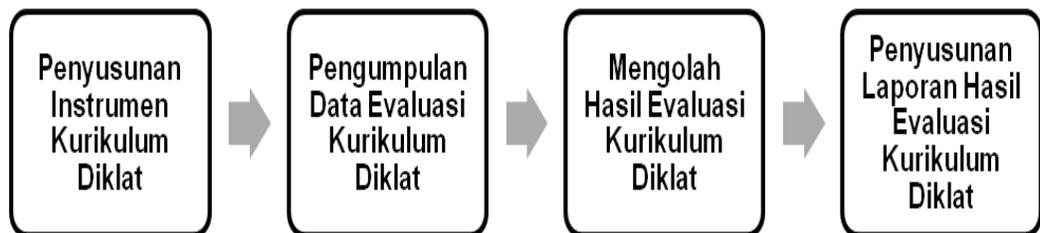
tersebut dalam bentuk: (1) pretest dan posttest yang diberikan dan dikerjakan oleh peserta diklat, (2) instrumen penilaian peserta baik pembelajaran di kelas (*indoor*) maupun praktek belajar lapangan (*outdoor*) yaitu widyaiswara melakukan penilaian terhadap peserta diklat, (3) instrumen praktek diklat/praktek belajar lapangan (*outdoor*) yaitu peserta PKH/masyarakat memberikan penilaian kepada peserta diklat, peserta PKH/masyarakat merupakan pihak-pihak yang diberikan pembelajaran dan bimbingan oleh peserta diklat, (4) instrumen widyaiswara yaitu peserta diklat menilai kinerja widyaiswara, (5) Instrumen evaluasi *Master Of Trainer* (MOT) yaitu peserta diklat menilai kinerja MOT, (6) instrumen supervisi pelaksanaan diklat yaitu bidang tenaga kesejahteraan sosial masyarakat menilai proses pelaksanaan diklat, (7) Instrumen alumni diklat yaitu Pusdiklat Kesejahteraan Sosial menilai kinerja alumni peserta diklat dalam organisasi di luar Pusdiklat Kesejahteraan Sosial. Alumni diklat merupakan peserta diklat tahun lalu yang masih dalam pengawasan atau monitoring berkaitan dengan implementasi pembelajaran diklat yang telah diberikan. Dalam hal ini evaluasi alumni diklat dilakukan sesudah pelaksanaan kegiatan diklat TOT P2K2 PKH.

Tahap selanjutnya yaitu mengolah hasil evaluasi kurikulum diklat TOT P2K2 PKH. Mengolah data evaluasi kurikulum diklat

dilakukan berdasarkan skoring setelah hasil evaluasi kurikulum tersebut terkumpul dan disajikan kedalam bentuk tabulasi maupun grafik yang akan dituangkan ke dalam laporan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil evaluasi kurikulum yang digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum. Widyaiswara dan staf bidang pelaksanaan diklat kesejahteraan sosial masyarakat berperan mengolah data evaluasi ke dalam bentuk tabulasi data.

Tahap selanjutnya yaitu penyusunan laporan hasil evaluasi kurikulum diklat TOT P2K2 PKH. Sebelum menyusun laporan hasil evaluasi diklat, pusdiklat melakukan dikusi/rapat evaluasi terlebih dahulu yang melibatkan pejabat struktural pusdiklat kesejahteraan sosial dan widyaiswara yang bertujuan untuk mendiskusikan hal-hal apa saja yang digunakan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi sebagai tindak lanjut dalam perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan kurikulum diklat TOT P2K2 PKH selanjutnya. Selanjutnya menghasilkan laporan dalam dua bentuk yaitu laporan pelaksanaan diklat TOT P2K2 PKH dan laporan monitoring dan evaluasi diklat P2K2 PKH. Kepala sub bidang penjamin mutu, evaluasi dan pelaporan berperan menyusun laporan monitoring dan evaluasi diklat dan kepala sub bidang pelaksanaan diklat kesejahteraan sosial masyarakat berperan menyusun laporan

pelaksanaan diklat TOT P2K2 PKH. Dokumen tersebut digunakan sebagai pertanggungjawaban keterlaksanaan diklat TOT P2K2 PKH. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disajikan dalam bentuk skema sebagaimana berikut:



Gambar 4.4 Proses Evaluasi Kurikulum Diklat

(Data lapangan, diolah peneliti, 2017)

6. Kendala yang Dihadapi dan Upaya Mengatasinya

Terkait dengan kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Pusdiklat Kesejahteraan Sosial dalam pengaplikasian kurikulum diklat TOT P2K2 PKH meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum diklat.

Pertama, kendala yang dihadapi dalam segi perencanaan kurikulum diklat dari proses identifikasi kebutuhan, analisis kebutuhan diklat, penyusunan kurikulum hingga editing dilakukan adalah waktu yang singkat terkait dengan anggaran yang tidak memadai dan terdapat waku yang sudah ditetapkan sebelumnya padahal, untuk menyusun kurikulum mulai dari tahap identifikasi kebutuhan sampai

adanya modul membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk proses yang maksimal. Dari sisi anggaran, sering terhambat dalam anggaran karena dalam proses perencanaan kurikulum harus melakukan beberapa kali uji coba modul karena sasarannya tidak hanya untuk Indonesia bagian barat saja tetapi seluruh Indonesia yang dalam menerima materinya berbeda-beda dan harus bisa mengakomodir secara menyeluruh. Sumber daya manusia yang sulit bertemu karena mereka memiliki kesibukan masing-masing diluar kegiatan perencanaan kurikulum diklat.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala yang dihadapi dalam perencanaan kurikulum diklat dari proses identifikasi kebutuhan, analisis kebutuhan diklat, penyusunan kurikulum hingga editing dilakukan adalah dengan mengerjakan perencanaan kurikulum dengan cepat, mengatur anggaran yang diberikan dengan seefisien mungkin agar dapat tercukupi, menggunakan dan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada tetapi itu semua bisa diselesaikan dengan baik

Kedua, kendala yang dihadapi dalam segi pelaksanaan kurikulum diklat adalah ada widyaiswara kurang menguasai materi, widyaiswara kurang siap dan peserta diklat kurang memiliki motivasi dalam mengikuti pembelajaran diklat.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum diklat adalah dalam proses pembelajaran diklat TOT P2K2 PKH adanya pendampingan widyaiswara jadi tidak satu widyaiswara yang mengajar disebut *team teaching* dan widyaiswara memberikan motivasi terhadap peserta diklat serta memberikan inovasi-inovasi dalam penyampaian materi.

Ketiga, kendala yang dihadapi dalam segi evaluasi kurikulum diklat adalah pada tahap pengolahan data dari instrumen evaluasi yaitu sumber daya manusia memiliki tanggung jawab yang rendah dalam melakukan proses tabulasi data.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala yang dihadapi dalam evaluasi kurikulum diklat adalah dengan melakukan pembagian tugas pekerjaan kepada sumber daya manusia dalam mengolah data instrumen evaluasi.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dari pengamatan, wawancara dan studi dokumen. Berikut ini disajikan temuan penelitian berdasarkan sub fokus:

1. Perencanaan Kurikulum Diklat TOT P2K2 PKH

Temuan penelitian yang berkaitan dengan perencanaan kurikulum diklat TOT P2K2 PKH yaitu (a) Tahap uji coba modul

dilakukan beberapa kali yaitu turun kelapangan dengan mengunjungi beberapa daerah bagian barat dan timur Indonesia disebabkan karena tidak semua bagian di Indonesia memiliki kemampuan, daya tangkap, karakteristik, budaya dan pengetahuan yang sama. Uji coba modul dilakukan dengan cara mensosialisasikan dan menguji implementasi sementara hasil penyusunan modul berupa materi yang tersedia di modul, metode dan media yang digunakan kepada masyarakat dilapangan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. (b) Teknik pada Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) yaitu FGD (*Focus Group Discussion*) yaitu melakukan diskusi tidak kaku terkait masalah-masalah kemiskinan yang dialami bertujuan agar tidak ada kesenjangan antara pusdiklat dengan masyarakat dan DIF (*Difficulty Importance Frequency*) yaitu proses menganalisis informasi melalui diskusi mendalam untuk mengetahui tingkat kesulitan, kepentingan dan keseringan yang terjadi di lapangan. Teknik tersebut dilakukan dengan cara mengunjungi beberapa daerah bagian barat dan timur Indonesia bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, menggambarkan sifat sebenarnya, menentukan sebab-sebab, rekomendasi berupa solusi alternatif yang tepat dengan permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia secara menyeluruh. Hasil analisis kebutuhan tersebut untuk

mendapatkan data dan informasi yang sesuai agar penyelenggaraan program diklat mampu menjawab persoalan-persoalan organisasi karena sudah direncanakan dengan matang sebelumnya.

2. Pelaksanaan Kurikulum Diklat TOT P2K2 PKH

Temuan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum diklat TOT P2K2 PKH yaitu kegiatan pelaksanaan kurikulum diklat TOT P2K2 PKH direalisasikan melalui kegiatan diklat dalam bentuk praktek belajar lapangan di daerah (*outdoor*). Praktek Belajar Lapangan (PBL) merupakan praktek belajar lapangan yang merupakan program lanjutan dari proses *indoor* yang dilakukan di daerah yang bertujuan untuk pengaplikasian materi yang dipelajari di kelas (*indoor*) sehingga dapat terampil dalam menerapkannya. Dengan kata lain secara komprehensif praktek belajar di lapangan merupakan penerapan seluruh metode yang diperoleh selama diklat dan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi Keluarga Miskin (KM) yang sebenarnya.

3. Evaluasi Kurikulum Diklat TOT P2K2 PKH

Temuan penelitian yang berkaitan dengan evaluasi kurikulum diklat TOT P2K2 PKH yaitu evaluasi kurikulum diklat yang dilakukan Pusdiklat Kesejahteraan Sosial yaitu evaluasi reaksi, proses

pembelajaran, perilaku dan hasil. (a) Evaluasi reaksi merupakan respon atau tanggapan peserta terhadap proses pembelajaran dan penyelenggaraan diklat. Evaluasi dilakukan dalam bentuk instrumen evaluasi penyelenggaraan diklat. Evaluasi ini menilai sarana dan prasarana, akomodasi, kualitas makanan diklat, modul, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kenyamanan dan kepuasan peserta, maka evaluator harus segera memberitahukan informasi tersebut, (b) Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk mengukur ada atau tidak adanya perubahan pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitudes*) dan keterampilan (*skills*) peserta. Evaluasi dilakukan dalam bentuk pretest dan posttest, (c) Evaluasi perilaku dilakukan untuk mengetahui perubahan tingkah laku peserta selama dan setelah proses pembelajaran. Evaluasi dilakukan dalam bentuk instrumen penilaian peserta diklat dan instrumen praktek diklat. Tindak lanjut evaluasi ini berkaitan dengan materi diklat yang diberikan, apakah sesuai dengan yang dibutuhkan peserta diklat untuk diaplikasikan ditempat bekerja. Hasil evaluasi ini diinformasikan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam mendesain kurikulum program diklat, untuk diberikan tindakan atau rekomendasi yang diberikan dalam evaluasi kurikulum, (d) Evaluasi hasil terhadap penerapan hasil diklat dilakukan sekitar tiga bulan setelah diklat berakhir dengan maksud untuk mengukur kesesuaian (*applicability*) materi diklat yang telah diberikan. Melalui

evaluasi ini dapat diketahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh dari diklat membawa manfaat untuk mengatasi masalah. Evaluasi semacam ini perlu dilakukan untuk keperluan perbaikan materi diklat. Evaluasi dilakukan dalam bentuk instrumen evaluasi alumni diklat. Evaluasi ini memberikan hasil apakah program diklat yang diselenggarakan sesuai dengan ekspektasi instansi yang mengirim peserta diklat dan apakah terjadi perubahan positif di instansi sebagai dampak kegiatan diklat. Hasil evaluasi ini ditindaklanjuti kepada pihak yang bertanggung jawab dalam menangani kurikulum diklat, sehingga dapat segera diberikan tindakan yang sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Penerapan evaluasi empat level dalam kegiatan evaluasi di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk memberikan informasi terkait rekomendasi yang diberikan kepada pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab.

C. Pembahasan

Dalam sub bab ini peneliti akan melakukan penyesuaian berdasarkan temuan penelitian dari setiap sub fokus di tempat penelitian dengan justifikasi teori yang ada.

1. Perencanaan Kurikulum Diklat TOT P2K2 PKH

Perencanaan kurikulum diklat di pusdiklat kesejahteraan berfungsi sebagai pedoman yang berisi petunjuk dalam proses

pembelajaran pada kegiatan diklat. Proses perencanaan kurikulum diklat TOT P2K2 PKH di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial diawali dari **tahap pertama** yaitu identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan P2K2 PKH dilakukan dengan memperhatikan ketentuan/kebijakan pemerintah, pandangan para ahli, pengalaman negara lain, hasil riset mengenai kemiskinan dan disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang terjadi di Indonesia mengenai masalah kemiskinan yang menghasilkan data dan informasi yang dijadikan dasar bagi penentuan tujuan penyelenggaraan program-program diklat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Tahap kedua, Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, menggambarkan sifat sebenarnya, menentukan sebab-sebab, rekomendasi berupa solusi alternatif yang tepat dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dilaksanakan dengan cara mengunjungi beberapa daerah bagian Barat dan Timur Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) menggunakan beberapa bentuk seperti; wawancara, penyebaran kuisioner, FGD (*Focus Group Discussion*), DIF (*Difficulty Importance Frequency*).

Tahap ketiga, Penyusunan Kurikulum berfungsi sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Menyusun kurikulum memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yaitu pertimbangan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan hasil analisis kebutuhan diklat yang sesuai dengan kondisi lapangan yang digunakan untuk menentukan latar belakang kurikulum, tujuan kurikulum, kompetensi dasar, mata diklat dan jam diklat, kriteria peserta diklat dan tenaga pengajar, evaluasi. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Beane yang dikutip oleh Wahyudin bahwa perencanaan kurikulum adalah

*“A process in which participants at many levels make decisions about what the purposes of learning ought to be, how those purposes might be carried out through teaching – learning situation, and whether the purposes and means are both appropriate and effective”.*¹

Artinya, perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika berbagai komponen dalam berbagai level membuat keputusan tentang bagaimana seharusnya sebuah tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi belajar mengajar, serta penelaah keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut.

Tahap keempat, Penyusunan Modul merupakan sebuah produk yang dihasilkan dari kurikulum. Modul sebagai bahan ajar yang

¹Dinn Wahyudin, *Op.Cit*, h.81

membantu peserta diklat dan narasumber/fasilitator dalam proses pembelajaran. Penyusunan modul berbentuk pertemuan diskusi/rapat dengan melakukan brainstorming untuk menentukan kompetensi inti, materi diklat, metode dan media pembelajaran yang dibuat sangat sederhana dan disesuaikan dengan keadaan lapangan didukung dengan pendapat pakar ahli, referensi buku-buku dan peraturan pemerintah. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hamalik bahwa perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya tenaga, dan sarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi.²

Tahap kelima, Uji Coba Modul dengan cara mensosialisasikan dan menguji implementasi sementara hasil penyusunan modul berupa materi yang tersedia di modul, metode dan media yang digunakan kepada masyarakat dilapangan. Uji coba modul ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Tahap keenam, Penyempurnaan Modul merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menganalisis kelemahan dan kelebihan kurikulum hasil uji coba modul.

²Oemar Hamalik, h.152

Tahap ketujuh, Seminar modul merupakan sebuah kegiatan memaparkan hasil modul yang telah disempurnakan. Pada tahap seminar modul dilakukan kajian bersama pakar atau ahli yang kemudian menjadi bahan pertimbangan, saran dan masukan terkait isi modul dalam tahap akhir penyempurnaan kurikulum.

Tahap kedelapan, Editing merupakan kegiatan memilih dan menyusun ulang modul hingga modul tersebut siap digunakan dalam kegiatan diklat.

Pihak-pihak yang mendukung dan terlibat dalam proses perencanaan kurikulum diklat TOT P2K2 PKH yaitu Direktorat jenderal perlindungan dan jaminan sosial, Direktorat penyandang disabilitas, Direktorat lanjut usia, Direktorat anak, Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, World bank, UNICEF, Kementerian kesehatan, pusdiklat kesejahteraan sosial, BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), hingga Australia Aid.

Dalam pemaparan diatas diketahui bahwa perencanaan kurikulum diklat TOT P2K2 PKH telah melalui proses identifikasi kebutuhan analisis kebutuhan diklat, penyusunan kurikulum, penyusunan modul, uji coba modul, penyempurnaan modul, seminar modul dan editing secara mendalam, memuat aspek-aspek kurikulum secara lengkap, mempertimbangkan keputusan-keputusan, serta

melibatkan banyak pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip perencanaan kurikulum yang dikemukakan oleh Hamalik yang dikutip oleh wahyudin, sebagai berikut:

- a. Perencanaan kurikulum berkenan dan berkaitan erat dengan pengalaman-pengalaman para siswa.
- b. Perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang isi dan proses, yang tidak terlepas dari isi, materi, pokok bahasan, bidang studi serta berkaitan erat dengan proses dan cara penyampaian isi tersebut.
- c. Perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang isu dan topik.
- d. Perencanaan kurikulum melibatkan banyak pihak, antara lain kelompok guru mata pelajaran, kepala sekolah, pemerhati pendidikan, orang tua, *stakeholder* dan pihak pihak lain yang terkait.
- e. Perencanaan kurikulum dilaksanakan diberbagai tingkat/jenjang.
- f. Perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkesinambungan.³

Dengan adanya perencanaan kurikulum diklat TOT P2K2 PKH yang dilakukan Pusdiklat Kesejahteraan Sosial tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran atau proyeksi atas langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka implementasi kurikulum.

2. Pelaksanaan Kurikulum Diklat TOT P2K2 PKH

Kegiatan pelaksanaan kurikulum diklat TOT P2K2 PKH merupakan realisasi atas perencanaan kurikulum diklat yang sebelumnya telah disusun melalui kegiatan diklat dalam bentuk proses

³Dinn Wahyudin, *Op.Cit*, h.87

pembelajaran di dalam kelas dan praktek belajar lapangan di daerah. Pelaksanaan kurikulum diklat TOT P2K2 PKH melalui proses pembelajaran di kelas karena merupakan tempat untuk melaksanakan kurikulum. Proses pembelajaran TOT P2K2 PKH terbagi menjadi dua bagian yang tidak dapat dipisahkan yaitu pembelajaran di kelas (*indoor*) dan diluar (*outdoor*) berupa Praktek Belajar Lapangan (PBL). PBL merupakan praktek belajar lapangan yang merupakan program lanjutan dari proses *indoor* yang dilakukan di daerah yang bertujuan untuk pengaplikasian materi yang dipelajari di kelas (*indoor*). Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Hamalik bahwa implementasi kurikulum adalah

Penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya.⁴

Dalam pelaksanaan kurikulum diklat TOT P2K2 PKH terdapat komponen-komponen pendukung yang perlu diperhatikan guna menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan diklat TOT P2K2 PKH. **Komponen pertama** berkaitan dengan narasumber/fasilitator yaitu pihak-pihak yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan

⁴Oemar Hamalik, *Op.Cit*, h.238

proses pembelajaran diklat TOT P2K2 PKH secara langsung. Dalam hal ini, narasumber/fasilitator diklat TOT P2K2 PKH terdiri dari: widyaiswara, konsultan P2K2 PKH, pakar bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, anak dan kesejahteraan sosial.

Komponen kedua yaitu berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pusdiklat Kesejahteraan Sosial. Prasarana yang dimiliki Pusdiklat Kesejahteraan Sosial yaitu ruang perpustakaan, ruang kelas, ruang *microteaching*, laboratorium komputer, sarana outbond. Selain itu, Pusdiklat Kesejahteraan Sosial ini juga telah memiliki sarana yang menunjang pelaksanaan kurikulum seperti: *flip over chart*, papan tancap dengan kertas/kartu metaplan, *flannel board* beserta *flannel graphnya*.

Komponen ketiga yaitu berkaitan dengan media dan bahan ajar yang digunakan oleh Pusdiklat Kesejahteraan Sosial sesuai dengan perencanaan kurikulum diklat. Media dan bahan ajar yang digunakan dalam diklat TOT P2K2 PKH antara lain yaitu modul P2K2 PKH, lembar/kartu arus tulisan atau gambar, lembar petunjuk simulasi, lembar petunjuk peragaan, poster, *leaflet*, *booklet*, bagan-bagan, media penyajian *power point* dalam USB/CD, alat bantu peraga.

Komponen keempat yaitu berkaitan dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam diklat TOT P2K2 PKH sesuai perencanaan kurikulum diklat seperti

peragaan, simulasi, bermain peran (*role playing*), diskusi pleno, diskusi panel, sumbang saran, berbagi pengalaman, studi kasus, *focus group discussion*.

Komponen kelima yaitu berkaitan dengan peserta diklat. Untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kurikulum dengan perencanaan kurikulum diklat, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peserta didik.

Diklat TOT P2K2 PKH diselenggarakan dengan waktu 80 jam pelatihan, dengan alokasi waktu penyelenggaraan selama 17 hari efektif. Pelaksanaan diklat lebih banyak dilakukan dengan praktek dan simulasi yakni sebanyak 80%, sedangkan penyampaian materi berupa paparan dilakukan sebanyak 200% dari keseluruhan waktu pelaksanaan diklat TOT P2K2 PKH.

Dalam proses pembelajaran diklat TOT P2K2 PKH dikelas, widyaiswara membuka pelajaran dengan interaktif terhadap peserta diklat, materi yang disampaikan mengikuti setiap langkah yang ada di modul sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, menutup pelajaran dengan menyisipkan motivasi dan mengulang materi yang sudah dipelajari, memanfaatkan sarana dan prasarana, serta menggunakan bahan ajar dan memanfaatkan media pembelajaran diklat dengan baik.

Dalam pemaparan diatas diketahui bahwa pelaksanaan kurikulum diklat TOT P2K2 PKH telah melalui proses pembelajaran secara mendalam sebagai bentuk pelaksanaan dan pengujian terhadap kurikulum, memuat komponen-komponen pelaksanaan kurikulum dengan memperhatikan kemampuan tenaga pengajar serta mengimplementasikan aspek-aspek yang termuat dalam kurikulum. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Rusman, bahwa implementasi atau pelaksanaan kurikulum adalah pembelajaran di kelas merupakan tempat untuk melaksanakan dan menguji kurikulum. Dalam kegiatan pembelajaran semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan guru di uji dalam bentuk perbuatan, yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata. Perwujudan konsep, prinsip, dan aspek-aspek kurikulum tersebut seluruhnya terletak pada kemampuan guru selaku implementator kurikulum.⁵

Dengan adanya pelaksanaan kurikulum diklat TOT P2K2 PKH yang dilakukan Pusdiklat Kesejahteraan Sosial tersebut dapat memberikan gambaran bahwa usaha-usaha dalam melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap, sehingga peserta

⁵Rusman, *Op.Cit*, h.74

diklat menguasai seperangkat kompetensi tertentu, sebagai hasil interaksi dengan lingkungan dari penerapan ide, konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, kemampuan guru dan kebijakan kurikulum dalam semua aktivitas pembelajaran.

3. Evaluasi Kurikulum Diklat TOT P2K2 PKH

Evaluasi kurikulum diklat TOT P2K2 PKH terdiri dari fungsi evaluasi formatif mulai dari perencanaan kurikulum dengan adanya uji coba modul dan seminar modul yang didalamnya terdapat pertimbangan dan masukan dari pakar ahli dan masyarakat bertujuan untuk mendapatkan perbaikan terkait pada beberapa bagian modul dan proses pelaksanaan kurikulum diklat juga dilakukan evaluasi yang berasal dari peserta diklat, widyaiswara dan bidang penyelenggara diklat. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen dalam rangka memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum diklat dalam proses pembelajaran kemudian fungsi evaluasi sumatif dilakukan pada akhir keseluruhan pelaksanaan kurikulum diklat TOT P2K2 PKH yang dilakukan melalui rapat evaluasi hingga menghasilkan laporan evaluasi. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hermawan, bahwa evaluasi kurikulum terdiri dari dua fungsi, yaitu fungsi sumatif dan fungsi formatif. Evaluasi Formatif dilaksanakan apabila kegiatan evaluasi diarahkan untuk memperbaiki bagian

tertentu dari kurikulum yang sedang dikembangkan, sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan apabila kurikulum telah dianggap selesai pengembangannya (evaluasi terhadap hasil kurikulum).⁶

Evaluasi kurikulum diklat yang dilakukan Pusdiklat Kesejahteraan Sosial yaitu evaluasi reaksi, proses pembelajaran, perilaku dan hasil. (a) Evaluasi reaksi merupakan respon atau tanggapan peserta terhadap proses pembelajaran dan penyelenggaraan diklat. Evaluasi dilakukan dalam bentuk instrumen evaluasi penyelenggaraan diklat, (b) Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk mengukur ada atau tidak adanya perubahan pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitudes*) dan keterampilan (*skills*) peserta. Dalam diklat TOT P2K2 PKH evaluasi dilakukan dalam bentuk pretest dan posttest, (c) Evaluasi perilaku dilakukan untuk mengetahui perubahan tingkah laku peserta selama dan setelah proses pembelajaran. Evaluasi dilakukan dalam bentuk instrumen penilaian peserta diklat dan instrumen praktek diklat, (d) Evaluasi hasil terhadap penerapan hasil diklat dilakukan sekitar tiga bulan setelah diklat berakhir dengan maksud untuk mengukur kesesuaian (*applicability*) materi diklat yang telah diberikan. Melalui evaluasi ini dapat diketahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh dari diklat membawa manfaat untuk mengatasi masalah. Evaluasi

⁶Hermawan. A.H, *Op.Cit*, h.89

semacam ini perlu dilakukan untuk keperluan perbaikan materi diklat. Evaluasi dilakukan dalam bentuk instrumen evaluasi alumni diklat. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Rusman bahwa evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematis tentang manfaat, kesesuaian efektifitas dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan.⁷

Proses evaluasi kurikulum diklat TOT P2K2 PKH diawali dari **tahap pertama** yaitu penyusunan instrumen evaluasi kurikulum diklat TOT P2K2 PKH ke dalam bentuk alat ukur penilaian terhadap penyelenggaraan diklat.

Tahap kedua yaitu pengumpulan data berupa informasi maupun penilaian melalui penyebaran angket/kuisisioner atau instrumen evaluasi lainnya. Kegiatan pelaksanaan evaluasi kurikulum bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi suatu kurikulum meliputi peserta, narasumber/fasilitator, hingga keseluruhan proses pembelajaran yang kemudian dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam pengambilan keputusan, penyempurnaan dan pengembangan diklat TOT P2K2 PKH selanjutnya. Hal ini sejalan dengan teori yang

⁷Rusman, *Op.Cit*, h.93

dikemukakan oleh Hopkins dan Antes yang dikutip oleh Rusman, bahwa evaluasi kurikulum adalah

Pemeriksaan secara terus menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program.⁸

Tahap ketiga yaitu mengolah hasil evaluasi kurikulum diklat TOT P2K2 PKH. Mengolah hasil evaluasi kurikulum diklat dilakukan berdasarkan skoring setelah hasil evaluasi kurikulum tersebut terkumpul disajikan kedalam bentuk tabulasi data maupun grafik.

Tahap keempat yaitu penyusunan laporan hasil evaluasi kurikulum diklat TOT P2K2 PKH. Diawali dengan diskusi/rapat yang menghasilkan laporan dalam dua bentuk yaitu laporan pelaksanaan diklat TOT P2K2 PKH dan laporan monitoring dan evaluasi diklat P2K2 PKH. Laporan dalam rangka perbaikan atas kekurangan yang terdapat dalam kurikulum sebagai rencana tindak lanjut dalam perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan kurikulum diklat TOT P2K2 PKH selanjutnya. Dokumen tersebut digunakan sebagai pertanggungjawaban keterlaksanaan diklat TOT P2K2 PKH.

Dalam pemaparan di atas diketahui bahwa evaluasi kurikulum diklat TOT P2K2 PKH telah melalui proses pengolahan dan penyusunan hasil evaluasi secara mendalam. Hal ini sejalan dengan

⁸ *Ibid*, h.93

tujuan evaluasi kurikulum yang dikemukakan oleh Hasan, sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi mengenai pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan suatu kurikulum sebagai masukan bagi pengambilan keputusan.
- b. Menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu.
- c. Mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum.
- d. Memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum.⁹

Dengan adanya evaluasi kurikulum diklat TOT P2K2 PKH yang dilakukan Pusdiklat Kesejahteraan Sosial tersebut dapat memberikan gambaran proses untuk melihat dan menilai sejauhmana keberhasilan kurikulum, sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akan perlu tidaknya memperbaiki sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

⁹S. Hamid Hasan, *Op.Cit*, hh.42-43